

TRACK 1

Pemerintah, atau Upaya Bina Damai Melalui Diplomasi

Kami para delegasi dari seluruh mahasiswa Hubungan Internasional se – Indonesia bertemu dalam Pertemuan Mahasiswa Hubungan Internasional se – Indonesia (PNMHII) XXIV di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kami mendorong penuh pemerintah untuk mengoptimalkan peran Indonesia melalui *multi-track diplomacy* dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara. Kami sepakat untuk melakukan upaya – upaya *curative* untuk mencapai tahap – tahap penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara.

1. Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap ikut berperan aktif dan meningkatkan peranannya dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni :
 - 1.1 Pemerintah Indonesia diharuskan untuk tetap berkomitmen dan berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan dengan basis *middle power* dan *founding father* ASEAN yang memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan di regional ASEAN yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.
 - 1.2 Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami konflik serupa, baik konflik antara pemerintah dengan kelompok separatis maupun konflik etnis seperti yang terjadi di Myanmar. Pengalaman ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi terciptanya resolusi dari kedua konflik kemanusiaan tersebut.
 - 1.3 Konflik yang terjadi di suatu negara, seperti konflik kemanusiaan tersebut, akan memberikan efek serta mempengaruhi stabilitas regional dan stabilitas global.
 - 1.4 Indonesia harus mempertegas sikapnya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai-nilai dan landasan teologis dunia dalam menata peradaban dunia, khususnya di Asia Tenggara.
2. Kami mendukung penuh pemerintah untuk melakukan penyelesaian konflik yang bersifat bijak, adil, tepat, dan tuntas. Sampai kepada terciptanya perlindungan terhadap masyarakat di masing – masing Negara.
3. Kami mendorong pemerintah untuk mencegah tindak kekerasan yang sering terjadi dalam upaya resolusi konflik kemanusiaan terutama di kawasan Asia Tenggara.

4. Kami mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dengan cara – cara persuasif agar konflik yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan, kerugian, dan segala dampak negatif yang lebih jauh.
5. Kami mendorong pemerintah untuk memfokuskan pada misi kemanusiaan (baik moral maupun materil) terhadap *civil society* di negara – negara yang berkonflik di kawasan Asia Tenggara.
6. Kami mengapresiasi peran pemerintah yang telah melakukan langkah – langkah nyata guna mendukung dilakukannya komunikasi di tingkat domestik Negara dengan cara menjadi fasilitator dan mediator untuk menyelesaikan konflik di negara bersangkutan.
7. Jika proses komunikasi di level domestik tidak kunjung menemukan penyelesaian masalah, maka kami mendukung terciptanya proses perundingan secara damai, dialog langsung dengan asas saling menghormati dan non-intervensi di tingkat regional dan multilateral guna mencari alternatif terbaik bagi resolusi konflik, demi kepentingan bersama.
8. Ketika tidak tercapai kesepakatan di level regional, di level multilateral kami mendorong pemerintah untuk turut membantu dalam berbagai hal, yakni sebagai berikut :
 - 8.1 Mengusulkan mandat dalam piagam PBB bab 7 mengenai kesepakatan kawasan yang memiliki kewenangan untuk dapat segera menghentikan konflik dan jatuhnya korban jiwa tanpa harus ikut dalam permasalahan internal suatu negara.
9. Kami mendorong pemerintah untuk turut berperan aktif dalam *ASEAN Inter Governmental Comission on Human Rights* (AICHR) dan membuat forum dialog antar pemerintah di bidang kemanusiaan.
10. Kami mendukung penuh peran pemerintah dalam berkoordinasi dengan aktor – aktor *non-governmental* lain yang peduli terhadap konflik kemanusiaan.
11. Kami mendorong pemerintah untuk berkomitmen mengoptimalkan sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam forum – forum internasional

TRACK 2

Non-Pemerintah/Profesional, atau Upaya Bina Damai Melalui Resolusi Konflik

Kami delegasi mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Jayabaya, Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah

Malang, bertemu hari ini dalam *Joint Statement Forum PNMHII XXIV UGM*, untuk memberi rekomendasi dalam mengoptimalkan peran Indonesia melalui aktor non-pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Kami sepakat melakukan upaya-upaya untuk membantu mencari solusi terhadap penyelesaian konflik-konflik kemanusiaan di Asia Tenggara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Adapun peran aktor non pemerintah dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara yaitu :

1. Pressure Group

1.1 Kami sepakat bahwa NGO memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan input yang akan digunakan pemerintah Indonesia untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil terhadap upaya penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Input yang diberikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

1.2 Kami merekomendasikan NGO untuk melakukan desakan politik kepada pemerintahan Indonesia untuk menghasilkan kebijakan dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara

2. Mediator

2.1 Kami setuju bahwa NGO memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bertindak sebagai mediator karena kedekatannya dengan kelompok *grassroots*. Hal ini akan mendukung pencapaian perdamaian hingga menyentuh akar permasalahan.

2.2 Kami mendukung penuh NGO untuk memfasilitasi proses-proses perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik serta mendorong kedua pihak menciptakan pemecahan masalah secara bersama-sama.

2.3 Dalam upaya penanganan konflik kemanusiaan di Asia Tenggara, kami juga merekomendasikan beberapa langkah taktis penyelesaian konflik, antara lain: mengirimkan tim observer yang dibutuhkan bagi penyelesaian masalah, yang telah mendapat persetujuan dari negara yang bersangkutan yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk tim pencari fakta.

2.4 Kami merekomendasikan pada NGO agar melakukan upaya joint statement untuk mengadakan pertemuan dan dialog kedua belah pihak yang berkonflik, yang kemudian terjadi kesepakatan lagi mengenai adanya suatu jadwal bagi dialog selanjutnya yang menghasilkan kesepakatan perhentian permusuhan.

3. Kerjasama Internasional

- 3.1 Kami merekomendasikan pada NGO agar mengadakan pertemuan dan koordinasi secara bertahap untuk saling bertukar pikiran tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian konflik kemanusiaan demi mengembangkan solusi-solusi penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara.
- 3.2 Kami mendukung NGO bersama-sama dengan NGO internasional untuk mengkampanyekan kepada masyarakat internasional pentingnya pengakuan nilai-nilai hak asasi manusia bagi semua bangsa di dunia.
- 3.3 Kami juga mengajukan NGO bekerjasama dengan ASEAN untuk membantu peranan ASEAN dalam merespon secara langsung setiap konflik kemanusiaan di Asia Tenggara, serta merekomendasikan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan Badan HAM ASEAN agar memberikan advokasi (pembelaan) terhadap korban konflik kemanusiaan yang ada di Asia Tenggara.

TRACK 3

Bisnis dan Perdagangan

1. Pada hari ini kami berkumpul di dalam Joint Statement Forum untuk membahas dan menganalisa mengenai konflik yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara serta mencari solusi yang terbaik untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam menginisiasi perdamaian serta memperjuangkan hak asasi manusia dari pihak-pihak yang berkonflik di kawasan Asia Tenggara melalui jalur bisnis atau perdagangan.
Mingat sebagai salah satu Inisiator berdirinya ASEAN, Peran Indonesia yang signifikan di ASEAN, penghormatan tertinggi yang diberikan Negara Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia, serta menghargai prinsip-prinsip ASEAN yang menghormati : persahabatan, kerjasama, prinsip kedaulatan, keadilan, integritas teritorial, non-intervensi, konsensus dan yang tercantum dalam ASEAN Charter dan kesatuan di dalam perbedaan.
2. Kami mengakui pentingnya perdagangan yang dilakukan oleh sektor bisnis/perusahaan yang berasal dari Indonesia untuk menjalin hubungan Ekonomi terutama dengan negara yang sedang mengalami Konflik, kami mendukung jalur diplomasi yang dilakukan dari sektor perdagangan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan manfaat yang ditimbulkannya diharapkan dapat menginisiasi

perdamaian dan membantu pihak yang sedang berkonflik untuk memperoleh hak dasarnya.

3. Kami mendukung pendekatan *Constructive Engagement* yang pertama kali diusung oleh Thailand, terhadap negara-negara tertentu yang sedang berkonflik untuk menghargai prinsip-prinsip diplomasi yang dianut oleh negara anggota ASEAN. Dan meyakini bahwa Pemberian insentif kepada negara yang sedang berkonflik jauh lebih efektif dibandingkan pemberian sanksi yang ditujukan kepada suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM.
4. Kami memberikan perhatian kepada sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat dan Eropa kepada Myanmar. Menurut kami sanksi tidak sesuai dengan prinsip yang dianut ASEAN dan hanya akan menambah penderitaan rakyat di Negara tersebut yang secara langsung merasakan akibat dari sanksi ekonomi tersebut.
5. Mengingat kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Bab VIII pasal 13 mengenai “Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.”
6. Mengingat *ASEAN Economic Community Blueprint A3 “Freeflow of Investment: Point 29 “Promote intra-ASEAN investments, particularly investments from ASEAN-6 to CLMV”*
7. Menekankan kembali Pasal 27 (1) Deklarasi HAM ASEAN “ Setiap orang berhak untuk bekerja, dengan pilihan bebas dari pekerjaan, untuk menikmati kondisi tepat, layak dan menguntungkan kerja dan memiliki akses ke skema bantuan untuk para penganggur.
8. Mengingat Bab V pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 : Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. ayat 3 (b) mengenai Fasilitas Penanaman Modal : Penanaman modal yang mendapat Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: point (e) : melakukan industri pionir. Ayat (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

9. Untuk mendorong perusahaan/ investor yang berasal dari Indonesia yang mau mendirikan usahanya sebagai pionir di daerah yang berkonflik dengan harapan dapat menginisiasi perdamaian, Indonesia dapat memberikan kemudahan/memfasilitasi para investor yang ingin melakukan investasi di luar negeri.
10. Mengingat *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* Part 1 Article 2 Number 1 yang telah diadopsi ke dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 “ *State parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding all races and to this end (c) each state party shall take effective measure to review governmental national and local policies and to amend rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination where ever it exist*”
11. Dalam respon mengenai konflik kemanusiaan yang terjadi pada negara Anggota ASEAN, kami mendukung inisiasi perdamaian melalui jalur bisnis dengan cara memberikan penyegaran ekonomi kepada negara – negara yang berkonflik.
 - 11.1 Yang dimaksud dengan Penyegaran Ekonomi adalah pembukaan pintu kerjasama ekonomi yang lebih besar berupa : penanaman modal ataupun mendirikan usahanya di negara yang berkonflik oleh pemerintah Indonesia pada negara yang berkonflik.
 - 11.2 Sebelum melakukan inisiatif penyegaran ekonomi ini, pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu mengadakan kerjasama/perjanjian dengan pemerintah negara tersebut agar pemerintah negara berkonflik tersebut dapat menjamin keamanan dan stabilitas untuk para perusahaan dari Indonesia untuk melakukan Investasi.
 - 11.3 Penyegaran Ekonomi ini merupakan Insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara yang sedang mengalami konflik jika negara tersebut melakukan niat baik untuk membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terjadi di negaranya, dan memenuhi hak hak dasar rakyatnya.
12. Mendorong perusahaan perusahaan Indonesia untuk melakukan investasi di sektor pariwisata dengan
 - 12.1 Pemerintah mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi kepada sektor pariwisata yang berhubungan dengan wisata alam seperti pantai, danau,

pegunungan, yang memerlukan banyak tenaga kerja di bidang jasa dan menciptakan banyak pekerjaan baru bagi masyarakat negara yang berkonflik

12.2 Mendorong para investor dan perusahaan di Indonesia untuk menanamkan modalnya di sektor Industri perhotelan, karena saat ini Asia Tenggara merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan industri yang cukup pesat, investasi di bidang perhotelan merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi Indonesia, Negara yang berkonflik maupun masyarakat yang berada di dalamnya yang bekerja dalam bidang jasa.

12.3 Bekerjasama dengan negara yang berkonflik di Asia Tenggara untuk mengadakan Expo untuk mempromosikan sektor pariwisata negara berkonflik tersebut kepada Investor – Investor yang berada di Indonesia pasca konflik tersebut usai

12.4 Mendorong negara negara ASEAN untuk mencapai kesepakatan *ASEAN Open Skies* di tahun 2015, karena dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut akan mendorong maskapai penerbangan di Negara – Negara ASEAN lebih mudah untuk mendarat di negara negara ASEAN dengan menghapus tarif dan beban tambahan, meningkatkan penerbangan dan memberikan lebih banyak pilihan bagi penumpang sebagai manfaat dari liberalisasi ruang udara bagi negara sinyal kenaikan seluruh kawasan dalam kerjasama dan kegiatan pariwisata, dengan kebijakan ini juga akan meningkatkan perkembangan industri penerbangan di negara yang berkonflik.

Karena dengan meningkatnya aktivitas pariwisata akan meningkatkan pendapatan dari negara tersebut dan pastinya akan memberi dampak positif akan peningkatan pendapatan dari warga, dan menambah lapangan kerja baru khususnya mereka yang bekerja dalam industri jasa.

13. Dalam Respon mengenai konflik antar agama, suku maupun etnis, Indonesia dapat memberikan kemudahan / fasilitas kepada investor atau perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bidang kesenian, untuk membantu para pengrajin lokal dari etnis minoritas dengan cara

13.1 Indonesia terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat untuk dapat menjalin kerjasama dalam sektor budaya dengan negara yang berkonflik

- 13.2 Mempromosikan hasil kesenian berupa : kerajinan tangan, tari tarian dan sebagainya yang berasal masyarakat minoritas dari suatu negara yang berkonflik. Promosi ini dapat berupa pameran Budaya yang diadakan di Negara tersebut, maupun di promosikan ke tingkat yang lebih luas yaitu negara ASEAN lainnya, promosi ini ditujukan untuk mengurangi sentimen antar budaya
- 13.3 Memfasilitasi Usaha Kecil Menengah Indonesia untuk terlibat dalam mempromosikan budaya masyarakat minoritas ini. Dengan membantu memproduksi dan mendistribusikan hasil kerajinan tangan masyarakat minoritas tersebut, akan lebih menyentuh dan memberikan manfaat terhadap masyarakat grassroot di daerah berkonflik.
14. Sebagai Negara yang telah meratifikasi *UN International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination* dan telah diadopsi ke dalam hukum domestik Indonesia UU no 29 tahun 1999 agar negara melakukan segala cara yang wajar untuk menghapuskan diskriminasi ras, Indonesia mendorong perusahaan – perusahaan Indonesia yang beroperasi di negara yang berkonflik untuk lebih banyak mempekerjakan pegawai yang berasal dari negara yang berkonflik tersebut dan menjamin quota representasi dari masyarakat yang merupakan minoritas sebagai upaya meminimalisir diskriminasi yang terjadi di negara yang berkonflik
15. Mendorong perusahaan Indonesia yang beroperasi di negara yang berkonflik untuk memberikan *Corporate Social Responsibility* seperti yang diatur dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 (b) yang berbunyi “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan program capacity building kepada masyarakat yang mengalami konflik kemanusiaan" dengan :
- 15.1 Mengadakan program beasiswa bagi masyarakat dari negara yang mengalami konflik kemanusiaan yang berprestasi
- 15.2 Mengadakan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perusahaan tersebut
- 15.3 Mengadakan kegiatan kegiatan yang meningkatkan kesehatan pada masyarakat yang berkonflik
- 15.4 Mengadakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat yang sedang mengalami konflik kemanusiaan

16. Mengingat kurangnya investasi di bidang Infrastruktur pada kawasan Asia Tenggara, sementara kebutuhan akan infrastruktur meningkat oleh sebab itu, perusahaan Indonesia sebaiknya mendorong :

16.1 Badan Usaha Milik Negara / persero untuk berinvestasi di negara yang berkonflik untuk membantu penyediaan logistik dalam pembangunan infrastruktur di negara yang berkonflik.

16.2 Badan Usaha Milik Negara / persero yang bergerak di bidang kontraktor untuk membuka cabang di negara yang berkonflik dan membantu negara berkonflik tersebut untuk membangun kembali infrastrukturnya

16.3 Selain memberikan keuntungan bagi negara yang berkonflik yaitu membantu pembangunan infrastruktur di daerah mengalami berkonflik, sektor bisnis negara tersebut meningkat akibat ketersediaan infrastruktur, Investasi dari Badan Usaha Milik negara / persero ini juga memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia berupa pemasukan dari BUMN dan perluasan sektor bisnis di bidang infrastruktur

17. Mengingat pangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, dan krisis harga pangan yang terjadi belakangan ini, telah menghadirkan peluang yang baik untuk Indonesia memberikan insentif bagi perusahaan Indonesia yang beroperasi di bidang agrikultur untuk membuka usaha di daerah yang berkonflik mendorong kerjasama dibidang agrikultural dengan negara yang mengalami konflik kemanusiaan

17.1 Memberikan subsidi bagi usaha kecil menengah Indonesia yang bergerak dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan agar dapat meningkatkan kuantitas eksportnya yang berupa bahan pangan kepada negara negara yang memiliki konflik kemanusiaan.

17.2 Mendukung NGO internasional seperti La Via Campesina yang bekerja dalam bidang advokasi di bidang pangan yang memiliki cabang di setiap negara di region Asia tenggara yang salah satu gugusan kerjanya adalah untuk memperjuangkan masyarakat yang hidup dari sektor agraris untuk mendapat keadilan dalam memperoleh lahan, dan memberikan pelatihan pelatihan seperti cara bercocok tanan, pengairan, pemberian pupuk, mengelola tambak yang efektif dan efisien agar dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang agrikultur yang memadai.

- 17.3 Mendorong dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan dan Investor dari Indonesia untuk berinvestasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan selain menguntungkan Indonesia dengan pengoptimalan sektor agrikultur di negara yang berkonflik yang menciptakan hasil produksi/ *supply* bahan pangan yang lebih banyak dengan itu dapat menjaga kestabilan harga pangan di kawasan Asia Tenggara, ini juga akan mendorong masyarakat di wilayah yang mengalami konflik untuk bekerja dan terlibat di sektor agrikultur dibandingkan terlibat dalam gencatan senjata maupun gerakan separatis, terlebih lagi sektor agrikultur bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan / *grassroot*.
18. Mendorong dan memfasilitasi BUMN Persero yang bergerak dalam bidang perbankan untuk mendirikan cabangnya di negara yang mengalami konflik kemanusiaan di Asia Tenggara, untuk membantu penyediaan modal dalam pembangunan negara tersebut dengan cara
- 18.1 Pemberian Kredit Mikro kepada usaha kecil menengah untuk menyegarkan perekonomian kelas menengah ke bawah yang ada di negara yang mengalami konflik
- 18.2 Membantu dalam pengadaan dana berupa pinjaman kepada BUMN milik pemerintah yang sedang berkonflik dalam melakukan proyek pembangunan,
19. Perusahaan Multi Nasional ataupun perusahaan Lokal bekerjasama dengan pemerintah dalam membuat iklan layanan masyarakat
- 19.1 Iklan produk perusahaan tersebut dalam media cetak, maupun media digital yang diiringi dengan pesan-pesan perdamaian dan menghargai kultur maupun budaya
- 19.2 Pembuatan baliho yang berisi iklan dari perusahaan tersebut yang diiringi dengan pesan-pesan perdamaian, untuk menyampaikan pesan-pesan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat *grassroot*
20. Mendorong pebisnis Indonesia untuk mengadakan forum dan dialog antara menteri Ekonomi/ Utusan pemerintah negara dan Investor yang berasal dari Indonesia dengan para investor yang juga berasal dari negara yang berkonflik di Asia Tenggara dengan tujuan untuk
- 20.1 Meningkatkan investasi dan perdagangan intra kawasan di mana Pemerintah, Sektor bisnis/ investor dari negara-negara Indonesia dan negara yang berkonflik bersama bertemu dan bertukar pendapat dan mencari solusi untuk menciptakan

kondisi yang lebih menjanjikan aman dan menguntungkan untuk pihak-pihak yang bersangkutan

20.2 Untuk melakukan kerjasama ekonomi dalam bidang investasi dan pada akhirnya menciptakan kawasan yang lebih stabil dan terhindar dari konflik akibat keterkaitan ekonomi melalui kerjasama perdagangan yang telah tercipta, (contoh One On One Business Matching 29 Juni-2 Juli 2011 pertemuan 16 Investor Indonesia dan 70 Investor dari Myanmar di KBRI Yangon)

21. Mendorong kapabilitas Usaha Kecil Menengah milik Indonesia untuk lebih terlibat aktif dalam memperluas pasarnya dengan menjalin kegiatan ekspor dan impor dengan negara yang berkonflik untuk menjalin hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Pendorongan kapabilitas ini dapat dilakukan dengan pemberian stimulus berupa :

21.1 Mendorong pasar ekspor UKM pada negara yang mengalami konflik dengan pemberian dana stimulus oleh Kementerian Kemenkop dan UKM kepada UKM yang memiliki potensi ekspor

21.2 Pengurangan suku Bunga Kredit Usaha rakyat mikro untuk mengoptimalkan kinerja UKM terutama di sektor ekspor

TRACK 4

Peran Warga Negara dalam Upaya Bina Damai Melalui Keterlibatan Personal

Hari ini, para delegasi dari seluruh mahasiswa Hubungan Internasional se – Indonesia bertemu dalam Pertemuan Mahasiswa Hubungan Internasional se – Indonesia (PNMHII) XXIV di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kami berupaya memberi rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh *stakeholder* dalam rangka mengoptimalkan peran Indonesia dalam menangani konflik kemanusiaan di Asia Tenggara melalui *Multi – Track Diplomacy* yang terfokus pada medium individu masyarakat, keterlibatan personal yaitu:

1. Masyarakat sipil perlu menanamkan rasa saling memiliki dan kesatuan di antara sesama masyarakat Asia Tenggara untuk menumbuhkan rasa kepedulian ketika terjadi konflik kemanusiaan.

Hal ini dapat dilakukan melalui:

1.1 Keikutsertaan dalam kegiatan NGO dan INGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan.

2. Menciptakan *mutual understanding through understanding each other* untuk penyebaran ide dan wacana serta mengkampanyekan bahaya dan dampak negatif konflik dalam upaya mengoptimalkan peran masyarakat sipil untuk perdamaian.

Hal ini dapat dilakukan melalui:

- 2.1 Tidak hanya sebatas memberikan pendapat dini tetapi personal juga melakukan respon cepat untuk melakukan dialog antara pihak – pihak yang terlibat konflik.
 - 2.2 Upaya menekan individu untuk meningkatkan *bargaining power*-nya melalui lembaga advokasi.
 - 2.3 Melakukan kampanye personal anti kekerasan yang menimpa kelompok atau golongan tertentu melalui akses sosial media dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HAM.
 - 2.4 Membentuk sebuah Deklarasi Bersama Masyarakat ASEAN yang berisi komitmen untuk memelihara perdamaian di Asia Tenggara.
3. Membentuk citra positif masyarakat sipil Indonesia proaktif dalam memelihara perdamaian.
 - 3.1 Berkomitmen dalam menjaga stabilitas keamanan pada level domestik.
 - 3.2 Mempromosikan HAM dan demokrasi di Asia Tenggara melalui kegiatan pengedukasian bagi komunitas masyarakat pasca konflik.

TRACK 5

Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan

Kami, mahasiswa ilmu hubungan internasional se-Indonesia, bertemu di Jogjakarta pada tanggal 25-30 November 2012 untuk membahas optimalisasi peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Isu kemanusiaan terus menjadi perhatian dikarenakan konflik kemanusiaan yang masih terus terjadi di dunia saat ini. Konflik kemanusiaan harus dapat diredam dikarenakan banyaknya dampak negatif yang dihasilkan. Sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia harus berperan aktif dalam resolusi konflik dan juga harus optimal dalam pelaksanaannya. Konflik kemanusiaan bisa dikatakan terjadi di hampir seluruh bagian dunia, termasuk juga Asia Tenggara. Indonesia dapat berperan besar di dalam Asia Tenggara dimana Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Sebagai salah satu pencetus ASEAN, institusi regional di Asia Tenggara, Indonesia juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

1. Hari ini, kami sebagai mahasiswa berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan sebagai langkah optimalisasi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik kemanusiaan yang ada.
2. Kami mendorong peran-peran akademisi dari perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan kontribusi tersebut, diperlukan keterlibatan penelitian oleh *think-tank* maupun perguruan tinggi di Indonesia.
3. Kami menekankan determinasi kami dalam kolaborasi antara pemerintah dan para akademisi untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi, karena melibatkan cara pandang yang berbeda dalam melihat konflik yang diteliti. Salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan mengundang delegasi terpilih dari tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia dalam seminar maupun diskusi ilmiah yang diselenggarakan pemerintah Indonesia.
4. Kami sepenuhnya percaya akan pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam membuka akses lebih luas lagi pada seluruh masyarakat Indonesia akan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Agar peran pemerintah tersebut dapat terwujud, diperlukan juga inisiatif dari perguruan tinggi di Indonesia.
5. Kami menyatakan pentingnya penyelenggaraan pendidikan mengenai nilai-nilai perdamaian yang didalamnya meliputi hak asasi manusia dan mengimplementasikan Kurikulum ASEAN bagi masyarakat di daerah berkonflik maupun yang tidak berkonflik sebagai langkah preventif munculnya konflik, agar masyarakat dapat saling menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan kepentingan pada lingkungan yang terdiri dari beragam suku, etnis, dan kepercayaan, sehingga tercipta perdamaian yang berkelanjutan.
6. Untuk menanggapi konflik kemanusiaan di dunia, Indonesia harus berperan secara signifikan di depan masyarakat internasional. Indonesia perlu mendorong negara lain khususnya di Asia Tenggara, akan pentingnya kesetaraan hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan dalam kurikulum ASEAN yang menanamkan nilai "*We*" *feeling* sejak dini. Pendidikan yang diberikan sejak dini diperlukan sebagai langkah pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan-kemungkinan konflik di masa yang akan datang. Pendidikan tersebut tidak akan berdampak maksimal pada penyelesaian konflik kemanusiaan bila tidak diterapkan oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.
7. Kami memberi perhatian kepada pentingnya pengadaan pelatihan pada daerah berkonflik maupun yang tidak berkonflik, seperti pelatihan melakukan pertolongan pertama kepada

korban dan pelatihan evakuasi. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat dikatakan sederhana tetapi sebenarnya pelatihan-pelatihan tersebut memiliki dampak yang signifikan kepada masyarakat.

8. Kami mendukung penuh pengadaan simulasi pihak-pihak yang berkonflik dalam menyampaikan perhatian dan mengedepankan kepentingannya dalam suatu konflik kemanusiaan. Simulasi yang bisa dilakukan dalam kalangan akademisi maupun kalangan lainnya ini, akan berujung pada resolusi konflik. Simulasi ini bertujuan agar dapat diketahui cara terbaik dalam menyelesaikan konflik tersebut, selain itu simulasi ini juga dapat menambah wawasan maupun kemampuan dalam berdiplomasi, yang menyiapkan akademisi menjadi pemimpin yang dapat menciptakan perubahan di masa yang akan datang.
9. Dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait. Keterlibatan LSM dalam pelaksanaan tersebut akan menghasilkan dampak positif bagi pengoptimalisasian peran Indonesia dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara pada bidang penelitian, pendidikan, dan pelatihan.

TRACK 6

Aktivisme, atau Upaya Bina Damai Melalui Advokasi

Kami mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia dalam Pertemuan Nasional Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) di Universitas Gadjah Mada (UGM), bertemu dalam rangka mengoptimalkan peran Indonesia melalui *multi-track diplomacy* dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Kami sebagai mahasiswa selalu mendorong aktivis Indonesia berjuang untuk menghapus segala bentuk masalah dan konflik kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri. Terdapat prinsip dan beberapa langkah yang ingin kami ajukan untuk para aktivis Indonesia untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Di dalam prinsip dan substansial tersebut terdapat beberapa landasan yang dapat mengatur pola berfikir, bertindak serta implementatif di lapangan dengan tidak meninggalkan batasan-batasannya. Adapun prinsip aktivis Indonesia yang kita ajukan tersebut, yaitu:

- Prinsip Aktivis Indonesia:

- Berlandaskan asas Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kebhinekatunggalikaan. Bahwa kode etik dari Indonesia seperti yang telah tercantum dalam UUD 1945 baik secara implisit dan eksplisit adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia perihal Hak Asasi Manusia demi kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam Klausa “Untuk Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
- Menaati Landasan Hukum domestik serta menghormati Hak Asasi Manusia lainnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum, sehingga dalam melakukan setiap tindakan/gerakan aktivis harus tetap menghormati serta mentaati Landasan Hukum serta HAM.
- Aktivis Indonesia adalah sejumlah aktivis yang mempunyai suatu pola pikir, dan adanya rutinitas pertemuan seperti sharing knowledge serta kegiatan lainnya yang berlandaskan kemanusiaan.
- Partisipasi serta peran Aktif dalam penegakan Hak Asasi Manusia.
- Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan asas Pancasila butir 2 ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan butir 5 ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ serta Impartial sebagai “center” dari prinsip penegakan Hak Asasi Manusia.
- Tidak menggunakan kekerasan saat menyampaikan aspirasi secara terbuka

Prinsip Aktivis tersebut diatas diimplementasikan melalui langkah sebagai berikut:

1. Dalam mengoptimalkan institusi-institusi yang bergerak dibidang *Hak Asasi Manusia* di Indonesia, maka perlu dilakukan:
 - 1.1 *Capacity building* yang berupa peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan menyelesaikan konflik dan upaya mencegah terjadinya konflik kemanusiaan.
 - 1.2 Meningkatkan pemahaman aktivis-aktivis tentang fungsi institusi *peace building* tersebut dengan cara;
 - a. Memberikan pelatihan terhadap aktivis mengenai prinsip dan tugas sebagai seorang aktivis didalam suatu institusi.

- b. Meningkatkan kesadaran masing-masing aktivis di dalam institusi terkait pentingnya penegakan hak asasi manusia.
2. Dalam menegakkan hak asasi manusia, melalui proses advokasi, kami mengakui pentingnya langkah-langkah mediasi diterapkan. Hal tersebut terangkum dalam 2 butir sebagai berikut:
 - 2.1 Integrasi, yakni usaha dalam menemukan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai. Jalur ini menerapkan pendekatan untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebagai upaya penyelesaian konflik demi terwujudnya solusi yang disepakati bersama tanpa ada salahsatu pihak yang merasa dirugikan.
 - 2.2 Tekanan, tekanan kepada pihak-pihak yang bertikai agar mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah secepatnya dan lebih terbuka untuk menerima masukan dari pihak ketiga.
3. Kami mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia, merekomendasikan aktivis Indonesia untuk menjalin koneksi dengan aktivis yang lainnya baik dari dalam negeri maupun dalam lingkup ASEAN. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kepekaan sosial dalam masyarakat secara luas terhadap hak asasi manusia. Dengan harapan setelahnya dapat memobilisasi suara yang lebih besar untuk menyuarakan perjuangan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara khususnya. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh aktivis Indonesia dalam rangka menjalin koneksi dengan aktivis lain adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Mengadakan pertemuan yang berupa konferensi dengan aktivis yang berada di seluruh Asia Tenggara untuk menyatukan suara dengan harapan setelah suara para kelompok aktivis terkumpul dapat memberikan dampak dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
 - 3.2 Pemberian seminar secara menyeluruh mengundang seluruh aktivis dan seluruh elemen masyarakat dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentang konflik kemanusiaan yang sedang terjadi. Demi terciptanya “awareness” dari setiap lapisan masyarakat. Adapun seminar ini juga mengajak pemerintah untuk turut serta berpartisipasi dalam seminar ini.
 - 3.3 Menjaln hubungan dengan masyarakat melalui bantuan media agar menimbulkan kepekaan yang sama terhadap perjuangan hak asasi manusia baik di lingkup aktivis itu sendiri maupun pada masyarakat luas.

3.4 Mobilisasi ini selanjutnya dapat memberikan dampak langsung bagi korban konflik kemanusiaan karena akan lebih mudah menggalang bantuan baik berupa bantuan materi maupun non materi.

4. Kami mahasiswa Indonesia sepakat mendorong aktivis untuk menjalin hubungan langsung dengan pemerintah guna menindak lanjuti perkembangan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi baik didalam maupun luar negeri. Adapun cara yang akan diambil diantara lain berupa:

4.1 Mengadakan pertemuan rutin 6 bulan sekali dalam 1 tahun dengan pemerintah guna mendiskusikan rekomendasi dari aktivis mengenai masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di dalam maupun luar negeri.

4.2 Mengadakan pertemuan darurat dengan pemerintah guna merespon masalah-masalah kemanusiaan diluar rapat rutin yang telah disepakati

4.3 Meminta kolaborasi antara aktivis dan pemerintah Indonesia untuk membangun hubungan dengan Negara terkait dalam hal penyelesaian kasus kemanusiaan. Adapun bentuk hubungan yang diharapkan yang akan terbentuk adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi mediator antara korban masalah kemanusiaan dengan “*home country*” dengan jalur diplomasi yang member manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Menjadi mediator antara korban masalah kemanusiaan yang mengungsi ke Indonesia (*host country*) dengan pemerintah asal pengungsi (*home country*).
- c. Menjadi mediator antara korban masalah kemanusiaan yang mengungsi ke Negara lain (*host country* selain Indonesia) dengan Negara asal pengungsi (*home country*)

TRACK 7

Agama, atau Upaya Bina Damai Melalui Keyakinan

Kami para delegasi Mahasiswa Hubungan Internasional bertemu hari ini dalam rangka *Joint Statement Forum* pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kami membahas mengenai cara mengoptimalkan peran Indonesia melalui *multi-track diplomacy* dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Asia Tenggara dengan fokus agama dalam menginisiasi perdamaian melalui implementasi kepercayaan.

1. Kami percaya bahwa pengiriman tokoh agama dari Indonesia ke daerah berkonflik di Asia Tenggara, merupakan upaya optimal dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Asia Tenggara. Dalam pengiriman tokoh agama tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Tokoh agama adalah seseorang yang ahli dalam bidang keagamaan dan dipilih oleh pemerintah untuk berangkat ke daerah yang berkonflik.
 - 1.2 Tokoh agama mengusahakan dialog lintas agama dengan tokoh agama di daerah yang berkonflik untuk membahas hal-hal dalam upaya resolusi konflik di daerah tersebut yang berdasarkan atas nilai-nilai perdamaian masing-masing agama.
 - 1.3 Dialog lintas agama tersebut dapat menghasilkan sebuah saran dan pendapat yang ditujukan kepada pemerintah setempat dan/atau kepada pihak yang berkonflik untuk mengupayakan resolusi konflik.
 - 1.4 Dialog lintas agama dapat pula berperan sebagai mediator untuk mengupayakan resolusi konflik antar pihak yang terlibat.
2. Kami percaya bahwa pembentukan komunitas lintas agama dari Indonesia dapat berperan optimal dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara.
 - 2.1 Komunitas lintas agama terdiri dari pemuka agama yang mewakili tiap agama yang diakui oleh Indonesia.
 - 2.2 Komunitas lintas agama tersebut melakukan upaya yang akan menghasilkan suatu bentuk resolusi konflik yang dapat menimbulkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konflik yang terjadi sehingga membawa tekanan kepada pihak yang melanggar hak asasi manusia.
3. Kami menyarankan adanya perubahan ulang pada struktur *Regional Interfaith Dialogue* yang awalnya merupakan forum komunikasi lintas agama antar negara ASEAN dan negara luar ASEAN seperti Australia, Selandia Baru, Timor Leste, dan Fiji menjadi sebuah organisasi yang memiliki struktur guna memudahkan dan memperkuat pengaruh dan hasil pembicaraan dalam forum.
 - 3.1 Dialog dalam pertemuan organisasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bentuk tindakan nyata untuk menangani penyelesaian konflik aktual yang sedang terjadi.
4. Kami menyarankan bahwa Indonesia dapat lebih mempromosikan pentingnya toleransi beragama setelah *Regional Interfaith Dialogue* telah berbentuk organisasi.

- 4.1 Organisasi *Regional Interfaith Dialogue* dapat melakukan upaya pencarian solusi pemecahan konflik di Asia Tenggara melalui pembentukan komisi ad hoc yang dibentuk oleh para anggota *Regional Interfaith Dialogue* dalam menyelesaikan konflik aktual yang sedang terjadi di Asia Tenggara.
5. Kami percaya apabila *Regional Interfaith Dialogue* tidak dapat menjadi solusi yang efektif maka tokoh agama Indonesia dapat menginisiasi pembentukan komunitas lintas agama regional yang akan mendiskusikan mengenai resolusi konflik kemanusiaan di Asia Tenggara sebagai langkah alternatif di lingkup regional.
- 5.1 Komunitas lintas agama regional ini terdiri dari pemuka agama yang merupakan perwakilan tiap agama yang ada di Asia Tenggara.
- 5.2 Komunitas lintas agama regional ini dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi.
- 5.3 Jika hal ini tidak memungkinkan maka komunitas lintas agama regional ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat regional terhadap konflik yang terjadi sehingga membawa tekanan kepada pihak yang menimbulkan konflik.

TRACK 8

Pendanaan Upaya Bina Damai Melalui Penyediaan Sumber Daya

Berdasarkan amanat awal ASEAN dalam pilar-pilar kerjasama pembentukan ASEAN yaitu kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya, dan kerjasama politik maka semua negara di ASEAN mempunyai kewajiban untuk mendukung penuh kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota termasuk dalam hal pendanaan dan penyediaan sumber daya dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan. Kami mendukung penuh kelompok-kelompok di ASEAN yang sudah ada seperti kelompok kerja kemanusiaan, *Asean Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), yang menjadi lembaga naungan dari kelompok kerja kemanusiaan di negara anggota ASEAN dalam hal penyaluran dana dan bantuan sumber daya akibat konflik kemanusiaan.

Kami merekomendasikan kepada organisasi non pemerintah di Indonesia dalam usaha pengoptimalan *multi-track diplomacy* jalur kedelapan, yaitu:

1. Lembaga

- 1.1 Mendorong organisasi-organisasi non-pemerintah untuk membentuk suatu badan/lembaga independen dalam tingkat nasional yang mengurus mekanisme pendanaan dan penyaluran sumber daya dengan fokus kepada pengelolaan bantuan terhadap korban konflik kemanusiaan yang berada di luar negeri. Badan independen ini bersifat terbuka dan *value free* sebagai bentuk dukungan terhadap badan-badan bentukan ASEAN yang sudah ada. Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme dan jenis sumber daya akan di jelaskan pada poin selanjutnya.
- 1.2 Mekanisme pengadaan sebuah badan/lembaga independen didasari oleh dua mekanisme yaitu mekanisme pengoperasian badan/lembaga tersebut dan mekanisme transparansi pengumpulan dan penyaluran dana sumbangan serta sumber daya. Pengoperasian badan/lembaga independen ini mengambil sistem yang sama dengan PBB yaitu melalui sumbangan sukarela dari iuran anggota tetap. Sedangkan mekanisme transparansi pengumpulan dan penyaluran dana sumbangan serta sumber daya dilakukan dengan sistem terbuka serta tepat sasaran kepada pihak-pihak lanjutan yang terkait.
- 1.3 Mengharuskan lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan baik yang disebutkan di poin-poin sebelumnya, maupun badan bantuan yang sudah ada untuk memiliki sistem informasi terpadu yang bisa diakses masyarakat sehingga akuntabilitas kelembagaan teruji dan dapat dipercaya dengan baik.
- 1.4 Mendorong kerjasama di antara lembaga bantuan kemanusiaan dalam lingkup nasional dan/atau internasional, baik yang dinaungi oleh pemerintah maupun non-pemerintah, khususnya di negara yang terlibat konflik guna mempermudah proses penyaluran bantuan dan akses para relawan untuk membantu korban sehingga terjadi kesinergisan tujuan.

2. Pendanaan

- 2.1 Mendukung bantuan dana yang berasal dari aktor-aktor lain selain pemerintah seperti individu, donatur, dan perusahaan nasional atau multi-nasional yang memiliki *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam melaksanakan tujuan dengan prinsip *value free*, transparansi, dan efektif.
- 2.2 Merekomendasikan kerja sama pemerintah dengan badan independen untuk mengelola bantuan dana yang bersumber dari pemerintah dan non-pemerintah (LSM, individu, perusahaan). Bantuan dana tersebut bersifat *value free* meskipun bersumber dari pemerintah.

3. Sumber Daya

3.1 Sumber daya yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik. Sumber daya fisik adalah sumbangan dalam bentuk tenaga sukarelawan, uang, obat-obatan, kebutuhan pokok dan sekunder, serta barang-barang keperluan lain. Sumber daya non-fisik adalah dukungan moral dan doa, petisi, draf resolusi, dan dokumen resmi lainnya yang akan diberikan secara langsung kepada korban konflik.

3.2 Sukarelawan yang akan dikirim ke daerah konflik, sebelumnya akan terlebih dahulu dibekali pendidikan dan juga persiapan sesuai dengan keahlian dan jenis bantuan yang akan dilakukan. Jenis bantuan tersebut meliputi bantuan tenaga medis, bantuan tenaga logistik, mediator, maupun bantuan lainnya.

3.3 Berdasarkan pada *ASEAN Human Right Commision*, Indonesia dapat meningkatkan upaya diplomasi dalam menangani konflik kemanusiaan melalui optimalisasi peran-peran dari institusi khusus.

TRACK 9

Komunikasi dan Media, melalui Informasi

Kami delegasi *Joint Statement Forum PNMHII XXIV* memberi rekomendasi upaya penyelesaian konflik kemanusiaan dengan mengoptimalkan peran media sebagai salah satu komponen dalam diplomasi. Oleh karena itu, kami menyatakan:

- Kami menyatakan apresiasi terhadap peran media yang telah terlibat aktif dalam berbagai upaya penyelesaian konflik kemanusiaan
- Kami mengakui bahwa masalah kemanusiaan merupakan masalah penting dan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat regional, termasuk media di dalamnya
- Kami mengakui bahwa berita memiliki efek yang besar terhadap konstruksi berpikir dan keadaan psikologi masyarakat dalam menyikapi masalah
- Kami mengakui pentingnya peran media sebagai subjek yang dapat melakukan propaganda dan mendorong terciptanya aksi kolektif oleh masyarakat

- Kami mengakui bahwa peran media sangat besar dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan negara
- Kami mengakui bahwa sistem informasi kontemporer sudah sangat terintegrasi, sehingga media perlu memiliki kapabilitas masif dalam melakukan penetrasi informasi kepada masyarakat

Dalam draft komunike ini, kami membagi peran media ke dalam tiga kategori: *news reporting*, *educational media*, dan *electroniccommunications media*.

1. *News Reporting*

News Reporting merupakan cara media Indonesia untuk meningkatkan upaya penyelesaian konflik kemanusiaan yang dibagi dalam intra dan eksternal Indonesia.

1.1 Intra Indonesia

Dalam rangka peningkatan kualitas media di Indonesia, kami membagi poin ini menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal.

a. Internal

- i. Kami merekomendasikan pihak media untuk menyajikan liputan yang lebih objektif dan netralterkait konflik kemanusiaan dengan memastikan:
 - Penggunaan berbagai perspektif
 - Penyeimbangan komposisi dari tiap perspektif secara proporsional
- ii. Kami mendukung penuh peran media dalam memberikan informasi berdasarkan data yang akurat dengan cara:
 - Menghindari pengambilan data dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, seperti situs-situs *open source*
 - Memprioritaskan riset empiris sebagai basis penyajian data
 - Menekankan kepada pemberitaan yang berbasis faktadengan:
 - Melakukan verifikasi terhadap data yang akan disajikan
 - Melakukan identifikasi awal permasalahan melalui riset independen
 - Menghindari penggunaan opini sebagai basis data
- iii. Kami mendukung penuh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam peliputan dan pemberitaan konflik dengan cara:
 - Melaksanakan pendidikan jurnalisme dalam bentuk *training*, loka karya, praktek lapangan, dan pemberian modul

- iv. Kami merekomendasikan pihak media untuk melakukan penyaringan dan penyeleksian berita-berita provokatif yang dapat mengekskalasi konflik
- v. Kami mendukung penuh penggunaan serta pemilihan *tone* (nada) yang sesuai dalam menggambarkan fakta.
 - Tone netral
 - Tone positif
Memberikan *image* baik terhadap aktor atau isu yang diberitakan
 - Tone negatif
Memicu penilaian yang negatif bagi aktor atau isu yang diberitakan
- vi. Kami merekomendasikan pihak media untuk melakukan pemilihan kata yang sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku
- vii. Kami mendukung pihak media untuk berperan lebih independen guna menghindari konflik kepentingan dari pihak tertentu dengan:
 - Menggunakan pendanaan yang independen (tidak memiliki afiliasi kepentingan dalam konflik tersebut)

b. Eksternal

- i. Kami mendorong pihak media untuk terlibat lebih aktif dalam proses penyadaran masyarakat terkait penyelesaian konflik kemanusiaan dengan cara :
 - Peningkatan intensitas pemberitaan mengenai upaya bina damai
 - Memberikan *exposure* yang lebih masif terhadap liputan mengenai bina damai dengan meletakkan pada *headline* dan memberi *space* yang lebih besar
 - Menyediakan forum diskusi (media cetak dan elektronik) melalui tanya jawab, wawancara, dan dialog interaktif yang melibatkan narasumber ahli
 - Menyediakan rubrik, liputan, atau acara khusus
 - Menyediakan ruang bagi promosi iklan layanan masyarakat
 - Menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau loka karya yang bersifat inklusif
 - Mendorong institusi, organisasi, maupun pihak-pihak lainnya untuk secara aktif terlibat dalam upaya penyadaran masyarakat mengenai pentingnya bina damai
 - Membuat film dokumenter dan liputan dengan menitikberatkan pada kerugian-kerugian yang dihasilkan dari konflik kemanusiaan

- ii. Kami merekomendasikan pihak media untuk berperan lebih aktif dalam membentuk dan menggalang opini publik dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan dengan cara :
- Menyebarkan optimisme dalam upaya transformasi konflik
 - ⇒ Mempublikasikan berita-berita yang bersifat solutif dan rekomendatif
 - ⇒ Menyediakan iklan layanan masyarakat
 - ⇒ Mempopulerkan slogan-slogan perdamaian
 - ⇒ Menitikberatkan kepada efek-efek positif yang mungkin dihasilkan dari adanya perdamaian
 - Menyediakan forum diskusi melalui tanya jawab, seminar, loka karya, dan dialog interaktif
 - Melaksanakan survey dan wawancara
 - Mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pandangannya melalui tulisan maupun tanggapan secara lisan
 - Menyediakan rubrik atau acara khusus yang ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat
 - Menggunakan seluruh media informasi yang ada dalam proses penyampaian informasi terkait bina damai
- iii. Kami mendukung penuh pihak media untuk berperan lebih aktif dalam mengawal upaya penyelesaian konflik kemanusiaan dengan :
- Mempublikasikan perkembangan bina damai secara berkala hingga tuntas
 - Mendirikan tim *ad hoc* yang terfokus pada permasalahan kemanusiaan
 - ⇒ melakukan riset independen
 - ⇒ melakukan verifikasi data
 - Mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk segera menyelesaikan konflik kemanusiaan yang sedang terjadi.
 - ⇒ Mengecam melalui berita yang dipublikasikan.
 - ⇒ Memberikan dukungan moral melalui pemberitaan yang dilakukan.
- iv. Kami mendukung penuh pihak media untuk memberikan rekomendasi penyelesaian konflik kemanusiaan yang dihasilkan dari proses wawancara atau diskusi yang melibatkan ahli serta masyarakat. Proses penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan melalui artikel yang diterbitkan serta acara yang dipublikasikan.

1.2 Eksternal Indonesia

Dalam upaya mengoptimalkan peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan di Asia Tenggara, maka kami merekomendasikan beberapa hal dibawah ini:

- a. Kami mengapresiasi dan mendukung penuh pengoptimalan integrasi informasi di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat regional mengenai pentingnya penyelesaian konflik kemanusiaan
- b. Kami mendukung terciptanya kerjasama antara media elektronik maupun cetak di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, untuk mengekspos berita-berita kemanusiaan yang telah didukung oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Informasi dan Teknologi.
 - i. Mengadakan kerjasama antara media di Indonesia dengan media mass media di Asia Tenggara untuk berperan lebih aktif dalam mengkampanyekan upaya binadama konflik kemanusiaan
 - Peningkatan intensitas pemberitaan mengenai upaya bina damai
 - Memberikan *exposure* yang lebih masif terhadap liputan mengenai bina damai dengan meletakkan pada *headline* dan memberi *space* yang lebih besar
 - Membuat slogan dan iklan mengenai kemanusiaan dalam upaya bina damai
 - Mendorong institusi, organisasi, maupun pihak-pihak lainnya di tingkat regional untuk secara aktif terlibat dalam upaya penyadaran masyarakat mengenai pentingnya bina damai
 - ii. Mengadakan kerjasama antara media di Indonesia dengan media di Asia Tenggara untuk mengkomunikasikan masalah kemanusiaan, baik upaya pencegahan maupun penyelesaian konflik, kepada masyarakat regional
 - iii. Memaksimalkan informasi tentang kemanusiaan agar masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya mengetahui dan menyelesaikan setiap konflik kemanusiaan di Asia Tenggara.
 - iv. Media lokal mendorong diadakannya forum diskusi dengan seluruh pihak media di Asia Tenggara untuk membentuk suatu wadah yang dapat menampung aspirasi dan opini masyarakat Asia Tenggara

- c. Kami berpandangan bahwa diperlukan komitmen untuk melakukan *common action* dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan di Asia Tenggara
 - i. Media sebagai pemberi informasi dan wadah penyaluran dana melalui kerja sama dengan berbagai pihak
 - ii. Media menyediakan forum diskusi (media cetak dan elektronik) melalui tanya jawab, wawancara, dan dialog interaktif yang melibatkan narasumber ahli
 - iii. Menyediakan rubrik, liputan, atau acara khusus
 - iv. Media menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau loka karya di tingkat regional

2. Educational Media

Educational Media merupakan upaya transformasi konflik kemanusiaan dalam jangka panjang.

- 2.1 Kami merekomendasikan pihak media untuk berperan lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik kemanusiaan.
 - a. Menerbitkan lebih banyak buku, essay, jurnal, dan makalah terkait bina damai.
 - b. Menerbitkan biografi yang berisikan pengalaman tokoh-tokoh perdamaian dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan.
 - c. Meningkatkan intensitas kegiatan yang dapat memperdalam kapabilitas masyarakat mengenai penyelesaian konflik kemanusiaan. Contoh: bedah buku dan diskusi ilmiah.
- 2.2 Kami mendorong pihak media untuk lebih berani dalam mempublikasikan karya-karya yang mengangkat tema penyelesaian konflik kemanusiaan.
- 2.3 Kami merekomendasikan pihak media untuk menyediakan *e-book* dari setiap karya fisik yang diterbitkan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Digital Millennium Copyrights Act*
- 2.4 Kami berkomitmen penuh untuk mendukung pihak media dalam meningkatkan inovasi terkait publikasi yang dilakukan. Pengimplementasian hal ini diwujudkan dalam bentuk media audio, visual, dan audio visual.
 - a. Mengemas sejarah atau pesan bina damai dalam bentuk komik atau cerita bergambar lainnya.
 - b. Menyediakan Teka Teki Silang atau bentuk pengujian pemahaman lainnya di halaman akhir dalam karya-karya yang membahas bina damai
 - c. Menerbitkan karya-karya dengan pesan bina damai berdasarkan segmentasi umur

- 6 – 12 tahun (buku cerita bergambar, komik)
 - 13 – 15 tahun (novel remaja, komik)
 - 16 – 21 tahun (buku, essay, jurnal, novel, makalah, dan komik)
 - Umum (buku, essay, jurnal, novel, makalah, dan komik)
- d. Menciptakan *software* atau *game* dengan menekankan bina damai sebagai substansinya
- e. Menciptakan lagu atau video yang sarat pesan perdamaian
- 2.5 Kami merekomendasikan pihak media unuk berperan lebih aktif sebagai wadah yang memfasilitasi masyarakat guna meningkatkan partisipasinya dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan.
- a. Mengadakan kompetisi pembuatan karya-karya dalam bentuk audio, visual, dan audio visual.
- Pembuatan karya ilmiah (essay, jurnal, dan makalah)
 - Video edukasi (dokumenter, kartun)
 - Jurnalistik
 - Sastra dan kesenian
 - ⇒ Sastra
 - ⇒ Puisi, pidato, cerita pendek, dan novel
 - ⇒ Seni Musik
 - ⇒ Seni Rupa
 - ⇒ Seni Tari
 - ⇒ Drama/teater
 - Membuat *advertisement*

3. *Electronic Communications Media*

Electronic Communications Media merupakan alat transkomunikasi masyarakat global, khususnya di Asia Tenggara, berbasiskan *computer networks* (internet).

3.1 Kami mengakui pentingnya *Electronic Communications Media* (ECM) dalam proses pertukaran informasi serta komunikasi masyarakat

3.2 Kami mengapresiasi segala bentuk fleksibilitas yang dimiliki oleh ECM dalam penyebaran informasi serta advokasi yang memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi tanpa adanya hambatan

- 3.3 Kami mendorong media elektronik untuk dapat berperan lebih masif dalam mengakomodasi proses komunikasi antar masyarakat dalam upaya bina damai
- a. Menyediakan lebih banyak wadah untuk diskusi (milis dan forum)